

## BAHASA DAN KEBENARAN DALAM DISKURSUS DIGITAL: PERSPEKTIF *VALIDITY CLAIM* HABERMAS

Anwar Ibrahim Triyoga<sup>1\*</sup>, Irma Surayya Hanum<sup>2</sup>, M. Rodinal Khair  
Khasri<sup>3</sup>, Surya Adinata Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup> Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

\*Pos-el: anwar.ibrahim@fib.unmul.ac.id

### ABSTRAK

Penyebaran hoaks yang cepat melalui platform digital telah menjadi tantangan signifikan terhadap validitas kebenaran dalam diskursus daring. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan yang menonjol selama periode pemilu. Survei nasional oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa 24,7% hoaks tersebut bersifat politis, yang menegaskan dominasi misinformasi politik di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dalam ruang digital memengaruhi konstruksi kebenaran dan validitas intersubjektif dengan merujuk pada teori klaim validitas Jürgen Habermas. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan artikel, yaitu dengan menelaah dan membandingkan sejumlah studi terdahulu mengenai komunikasi digital, hoaks, dan demokrasi deliberatif, sehingga diperoleh gambaran persamaan, perbedaan, serta kecenderungan temuan yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana setiap artikel mengidentifikasi klaim kebenaran, validitas normatif, serta relevansi informasi dalam diskursus digital. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam pendekatan penelitian, mayoritas artikel menegaskan bahwa diskursus digital sering kali gagal memenuhi kondisi ideal komunikasi rasional Habermas akibat bias algoritmik dan keterbatasan keterbukaan. Hal ini berimplikasi pada melemahnya konsensus dan rasionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital kritis sangat penting untuk memungkinkan individu menilai klaim kebenaran secara lebih efektif, mengurangi penyebaran hoaks, serta meningkatkan validitas diskursus digital.

**Kata kunci:** Bahasa, Diskursus, Habermas, Kebenaran, Klaim Validitas

Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif *Validity Claim*  
Habermas

**ABSTRACT**

*The rapid spread of hoaxes through digital platforms has become a significant challenge to the validity of truth in online discourse. Data from the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) recorded 1,923 hoax cases in 2024, with a notable increase during the election period. A national survey conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) revealed that 24.7% of these hoaxes were political in nature, underscoring the dominance of political misinformation in the digital sphere. This study aims to examine how language in digital spaces influences the construction of truth and intersubjective validity, drawing on Jürgen Habermas's theory of validity claims. The research employs a comparative article method, which involves analyzing and comparing previous studies on digital communication, hoaxes, and deliberative democracy to identify similarities, differences, and emerging trends. The analysis focuses on how each study addresses truth claims, normative validity, and the relevance of information within digital discourse. The findings suggest that, despite variations in research approaches, most studies affirm that digital discourse often fails to meet Habermas's ideal conditions for rational communication due to algorithmic bias and limited openness, thereby weakening consensus and rationality. This study concludes that strengthening critical digital literacy is essential to enable individuals to evaluate truth claims more effectively, curb the spread of hoaxes, and enhance the validity of digital discourse.*

**Keywords:** *Language, Discourse, Habermas, Truth, Validity Claim*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat. Kehadiran media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan mempercepat arus informasi sekaligus memperluas jangkauan penyebarannya. Namun, percepatan ini juga menghadirkan tantangan serius berupa derasnya penyebaran hoaks. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan signifikan selama periode pemilu. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahkan menunjukkan bahwa hampir seperempat dari hoaks tersebut bersifat politis, memperlihatkan bagaimana misinformasi politik mendominasi ruang digital di Indonesia.

Literatur tentang hoaks dalam ekologi komunikasi digital umumnya berpusat pada tiga horizon analitis. Pertama, horizon sosiologis yang menelaah konfigurasi jejaring dan sirkulasi pesan sebagai matriks penyebaran. Kedua, horizon psikologis yang mengurai disposisi kepercayaan serta kecenderungan agen untuk mereproduksi hoaks. Ketiga, horizon teknologis yang menempatkan algoritme sebagai perangkat penguat bias dan pengganda visibilitas. Wardle dan Derakhshan

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

(2017) merumuskan kerangka *information disorder* yang memotret "polusi informasi" sebagai patologi struktural dari ekosistem digital modern. Namun, corak dominan kajian-kajian tersebut tetap bersifat deskriptif-instrumental; ia jarang menelisik kondisi kemungkinan kebenaran (*conditions of possibility of truth*) dalam wacana daring yakni bagaimana klaim kebenaran dikonstruksi, digugat, dan dinegosiasikan sebagai persoalan justifikasi epistemik dan legitimasi normatif dalam ruang intersubjektif. Dalam konteks Indonesia, gejala *post-truth* sering direduksi menjadi isu literasi atau legal-formal, padahal secara etis-epistemologis ia menandai erosi rasionalitas publik dan pengabaian terhadap kebenaran dalam komunikasi politik. Celah penelitian ini ialah kelangkaan pendekatan filosofis terutama teori tindakan komunikatif untuk mendiagnosis dan mengoreksi patologi komunikatif di ruang digital, baik lokal maupun global.

Pada *The Theory of Communicative Action* yang dikemukakan oleh Habermas, terdapat klaim-klaim kesahihan (*validity claims*) yakni klaim kebenaran (*truth*), klaim ketepatan (*rightness*), klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerity*), dan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*). Komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang bebas dominasi, terbuka, dan rasional, sehingga dapat menghasilkan konsensus intersubjektif. Relevansi teori ini menjadi semakin kuat ketika dihadapkan dengan fenomena komunikasi digital yang sarat dengan bias algoritmik, misinformasi, dan keterbatasan literasi kritis. Diskursus digital pada akhirnya sering kali gagal memenuhi kondisi ideal komunikasi rasional yang digagas Habermas, sehingga konsensus sosial menjadi rapuh dan rasionalitas publik melemah.

Untuk memperkuat analisis filosofis terhadap fenomena ini, penelitian ini menggunakan metode komparatif atas dua studi kunci mutakhir. Pertama, Göran Goldkuhl (2012) mengkritisi konsep klaim validitas Habermas. Goldkuhl berpendapat bahwa klaim kebenaran tidak sepenuhnya universal; ia perlu dilengkapi dimensi lain seperti relevansi bagi audiens dan argumentativitas dalam diskursus. Dengan kata lain, sebuah pernyataan tidak cukup benar secara faktual, melainkan juga harus relevan bagi pendengar serta disampaikan melalui argumen yang memadai agar dapat diterima dalam komunikasi. Kedua, Anniina Leiviskä (2023) menegaskan pentingnya membedakan klaim normatif (*moral rightness*) dan klaim epistemik (*factual truth*) dalam wacana dekolonisasi universitas. Leiviskä menunjukkan bahwa klaim yang sah secara moral atau normatif belum tentu sah secara epistemik (berbasis kebenaran faktual), sehingga diperlukan standar kebenaran bersama agar diskursus tidak terjebak dalam relativisme. Tanpa kesepakatan mengenai tolok ukur kebenaran, upaya memasukkan perspektif keadilan moral dalam diskursus publik berisiko tergelincir menjadi sekadar opini relatif yang rentan bias.

Perbandingan kedua studi tersebut menegaskan bahwa perdebatan mengenai validitas klaim dalam komunikasi bukan sekadar isu teoretis, melainkan kunci untuk memahami konfigurasi wacana digital kontemporer. Temuan Goldkuhl menunjukkan perlunya memperkaya dan menyesuaikan kerangka Habermas

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

dengan praktik komunikasi yang multiarah dan ber-audiens luas: kebenaran faktual tidak memadai tanpa kekuatan argumentatif dan relevansi bagi komunikan. Sementara itu, Leiviskä menegaskan bahwa tanpa kerangka epistemik bersama, klaim kebenaran di ruang digital mudah tergelincir pada bias dan relativisme, meski tampak sah secara normatif. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini mengajukan pembacaan Habermasian atas fenomena hoaks digital. Kerangka klaim kesahihan Habermas digunakan untuk menelaah bagaimana kebenaran diklaim dan dipersoalkan dalam disinformasi daring, sembari merumuskan kritik normatif terhadap praktik komunikasi pada era *post-truth*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperdalam landasan teoretis, tetapi juga berkontribusi pada penguatan literasi digital kritis dan konsolidasi validitas diskursus publik di tengah gempuran hoaks.

## B. KERANGKA TEORI

Penelitian ini berangkat dari kerangka filsafat komunikasi dalam bahasa yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, khususnya melalui konsep teori tindakan komunikatif (Theory of Communicative Action) dan klaim validitas (validity claims). Menurut Habermas (1984; 1987), setiap tindakan komunikatif yang berlangsung dalam ruang sosial senantiasa mengandung tiga klaim dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara intersubjektif, yaitu klaim kebenaran, klaim kejujuran, dan klaim ketepatan. Klaim-klaim ini tidak hanya menjadi fondasi komunikasi rasional, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terbentuknya konsensus yang sah di tengah masyarakat.

Dalam konteks komunikasi digital, teori Habermas memperoleh tantangan baru. Platform digital yang beroperasi dengan algoritme seleksi informasi menciptakan fenomena filter bubble (Pariser, 2011) dan echo chamber (Sunstein, 2017), yang membatasi keterbukaan ruang publik. Kondisi ini menghambat pencapaian komunikasi bebas dominasi sebagaimana diidealkan Habermas. Penelitian terkini menunjukkan bahwa algoritme media sosial tidak netral, melainkan memperkuat polarisasi dan penyebaran informasi palsu (Bakshy, Messing, & Adamic, 2015; Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Oleh karena itu, penerapan kerangka Habermas pada diskursus digital menjadi penting untuk menganalisis bagaimana validitas klaim komunikasi sering kali terdistorsi oleh faktor struktural dan kultural.

Lebih jauh, dalam era *post-truth*, kebenaran sering kali dikalahkan oleh opini dan emosi. Oxford Dictionaries (2016) bahkan menetapkan *post-truth* sebagai "Word of the Year," menandai pergeseran di mana fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan emosi dalam membentuk opini publik. McIntyre (2018) menegaskan bahwa era *post-truth* ditandai oleh krisis epistemik, di mana otoritas pengetahuan melemah akibat dominasi misinformasi digital. Dalam situasi ini, teori klaim validitas Habermas menawarkan perspektif normatif yang relevan, sebab ia menuntut agar klaim kebenaran diuji secara intersubjektif melalui

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

rasionalitas komunikatif, bukan sekadar melalui dominasi wacana atau kekuatan algoritmik.

Kerangka teori ini juga diperkuat oleh kajian literasi digital kritis. Menurut Mihailidis & Viotty (2017), literasi digital tidak cukup hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, melainkan harus dikembangkan dalam kerangka kritis yang memungkinkan individu menilai kualitas klaim informasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu melihat bagaimana literasi digital kritis dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji klaim kebenaran, validitas normatif, dan relevansi informasi dalam diskursus digital. Dengan menggabungkan kerangka teori Habermas dan kajian literasi digital kritis, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam komunikasi rasional yang bebas distorsi, sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks serta meningkatkan kualitas deliberasi publik.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini memadukan perspektif filsafat komunikasi Habermas tentang klaim validitas dengan teori literasi digital kritis. Integrasi keduanya memungkinkan analisis mendalam mengenai kegagalan diskursus digital dalam memenuhi kondisi ideal komunikasi rasional, sekaligus menawarkan jalan keluar berupa penguatan literasi digital kritis sebagai strategi menghadapi tantangan hoaks dan misinformasi di era *post-truth*.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif filosofis. Fokus utama diarahkan pada pemetaan konseptual dua artikel, yaitu Goldkuhl (2012) dan Leiviskä (2023), guna menghasilkan redefinisi atas konsep bahasa dan kebenaran dalam diskursus digital. Metode perbandingan dipilih karena memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan argumen secara sistematis, sehingga memungkinkan lahirnya sintesis konseptual yang lebih luas. Seperti ditegaskan Sartori (1991), metode komparatif bukan sekadar menempatkan dua objek berdampingan, melainkan menganalisis titik temu dan divergensi untuk memperkaya pemahaman teoretis. Hal ini sejalan dengan pandangan Collier (1993) yang menekankan bahwa perbandingan berfungsi untuk memperjelas konsep dan menghindari bias reduksionis, serta dengan logika Most Similar Systems Design (Przeworski & Teune, 1970) yang membandingkan dua entitas dengan basis teoretis serupa namun menghasilkan penekanan yang berbeda.

Proses penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan melalui *close reading* terhadap kedua artikel, dengan tujuan mengekstraksi gagasan utama yang berkaitan dengan *validity claims*, bahasa, dan kebenaran. Dari Goldkuhl (2012) diperoleh kritik terhadap universalitas klaim kebenaran Habermas beserta usulan perluasan kategori validitas, sementara dari Leiviskä (2023) diperoleh argumentasi tentang pentingnya mempertahankan klaim kebenaran sebagai standar epistemik dalam konteks dekolonisasi universitas. Hasil bacaan kemudian dikategorisasi secara tematik dan dipetakan dalam bentuk komparasi konseptual. Tahap analisis

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas



dilakukan dengan membaca kedua argumen tersebut dalam kerangka dialektis: apakah klaim kebenaran perlu diperluas, dipertahankan, atau didefinisikan dalam konteks komunikasi digital.

Dari komparasi itu, langkah berikutnya adalah melakukan sintesis normatif-kritis. Hasil perbandingan menunjukkan adanya ketegangan konseptual: Goldkuhl mengarah pada desentralisasi klaim kebenaran, sementara Leiviskä justru menekankan resentralisasi kebenaran sebagai pijakan epistemik. Sintesis keduanya membentuk ruang dialektis *validity claims* yang lebih fleksibel, yakni tidak absolut, tetapi juga tidak kehilangan daya epistemik. Dalam kaitannya dengan diskursus digital yang sarat hoaks dan bias algoritmik, pendekatan komparatif ini memungkinkan penyusunan kerangka konseptual baru tentang bahasa dan kebenaran. Kerangka tersebut menegaskan bahwa komunikasi digital tidak hanya membutuhkan klaim kebenaran untuk menjaga validitas epistemik, tetapi juga membutuhkan dimensi relevansi, penghormatan, dan deliberasi agar intersubjektivitas komunikasi dapat benar-benar terwujud.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap Goldkuhl (2012) dan Leiviskä (2023) menunjukkan adanya dialektika konseptual dalam menafsirkan ulang teori *validity claims* Jürgen Habermas (1984, 1987). Keduanya berangkat dari kerangka *Theory of Communicative Action*, tetapi menghasilkan penekanan yang berbeda dalam membaca tantangan komunikasi digital kontemporer yang ditandai oleh derasnya arus informasi, polarisasi sosial, serta fenomena *post-truth* (McIntyre, 2018).

##### 1. Dialektika Validitas Komunikasi

Goldkuhl (2012) mengemukakan bahwa tiga klaim universal Habermas yaitu kebenaran (*truth*), keabsahan normatif (*rightness*), dan ketulusan (*sincerity*) terlalu sempit untuk menjelaskan kompleksitas komunikasi sosial, terutama dalam konteks media digital. Dalam praktik komunikasi daring, banyak ekspresi linguistik seperti humor, sarkasme, atau basa-basi yang tidak dapat diukur dengan kriteria benar-salah, tetapi tetap memiliki makna sosial. Oleh karena itu, Goldkuhl mengusulkan perluasan dimensi validitas dengan menambahkan unsur ketepatan deskriptif (*descriptive correctness*), relevansi terhadap audiens (*addressee relevance*), penghormatan (*respectfulness*), serta kekuatan argumentasi (*argumentativeness*). Melalui kerangka ini, validitas komunikasi tidak lagi semata bergantung pada kebenaran faktual, tetapi juga pada fungsi sosial dan kontekstual dari suatu tuturan (Goldkuhl, 2012).

Sebaliknya, Leiviskä (2023) menegaskan bahwa klaim kebenaran tetap menjadi fondasi epistemik komunikasi yang rasional. Menurutnya, tanpa standar epistemik bersama, diskursus publik akan terjerumus dalam relativisme, di mana setiap klaim dianggap sah berdasarkan perspektif partikular semata. Dalam konteks *decolonizing the university*, ia menegaskan perlunya membedakan klaim moral dan

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif *Validity Claim*  
Habermas

klaim epistemik, karena keadilan normatif tidak dapat menggantikan kebenaran faktual. Pandangan ini menegaskan bahwa komunikasi yang bermakna harus berlandaskan baik pada keabsahan moral maupun kebenaran empiris (Leiviskä, 2023; Habermas, 2023).

Perluasan dimensi validitas ala Goldkuhl berguna untuk menilai kualitas interaksi di media digital yang polisemis dan berkecepatan tinggi, sementara penekanan Leiviskä menjaga agar kompas kebenaran tidak hilang dalam hiruk-pikuk performativitas. Dengan kata lain, evaluasi komunikasi sebaiknya menggabungkan matriks pragmatik (relevansi, penghormatan, argumentasi, ketepatan deskriptif) dengan inti epistemik (bukti, koherensi, dan keterbukaan pada falsifikasi). Pendekatan terpadu semacam ini bukan hanya mencegah relativisme, tetapi juga menghindarkan formalisme rasional yang tuli terhadap konteks, sehingga percakapan publik tetap inklusif sekaligus bertanggung jawab secara kognitif.

## 2. Krisis Klaim Kebenaran dalam Era *Post-Truth*

Fenomena *post-truth* menunjukkan pergeseran epistemik di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih dominan daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik (McIntyre, 2018). Realitas algoritmik yang dibangun oleh platform digital menciptakan *filter bubble* (Pariser, 2011) dan *echo chamber* (Sunstein, 2017), yang menyebabkan masyarakat hanya terekspos pada informasi yang memperkuat pandangan mereka. Bakshy, Messing, dan Adamic (2015) menemukan bahwa pengguna Facebook lebih cenderung melihat berita yang sesuai dengan ideologi mereka, sedangkan penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan berita benar karena daya tarik emosional dan sensasionalnya.

Kondisi ini menegaskan bahwa dalam ekosistem digital, klaim kebenaran tidak lagi diuji melalui rasionalitas intersubjektif, tetapi melalui tingkat *engagement* dan popularitas (Waisbord, 2018). Dalam kerangka Habermasian, hal ini menandakan pergeseran dari komunikasi rasional menuju komunikasi strategis, di mana kebenaran diukur bukan berdasarkan argumentasi, melainkan oleh daya sebar informasi (Habermas, 1984; Van Dyk, 2022). Akibatnya, kebenaran menjadi relatif, tergantung pada sejauh mana ia disukai atau diviralkan oleh audiens.

Di satu sisi, perluasan dimensi validitas, misalnya memperhitungkan relevansi terhadap audiens, penghormatan, dan kekuatan argumentasi dapat membantu menakar kualitas interaksi dalam ekosistem digital yang polisemis. Di sisi lain, fondasi epistemik tak boleh dilepas. Klaim publik tetap harus tunduk pada bukti, kaidah inferensi, dan keterbukaan terhadap sanggahan. Tanpa jangkar tersebut, ruang wacana akan makin mudah dikooptasi oleh performativitas *engagement*, sementara tanpa kepekaan pragmatik, percakapan akan kehilangan daya jangkauan sosialnya. Sintesis keduanya yaitu ketangguhan bukti sekaligus kecermatan pragmatik akan memberikan kerangka kerja untuk menilai klaim kebenaran di era *post-truth* tanpa tererosi pada relativisme ataupun formalisme.

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

### 3. Fragmentasi Klaim Normatif dan Krisis Deliberasi

Habermas (1987) menempatkan klaim normatif sebagai landasan moral komunikasi, yakni sejauh mana suatu tuturan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang diakui bersama. Namun, dalam ekosistem media sosial, nilai-nilai tersebut terfragmentasi oleh polarisasi ideologi. Sunstein (2017) menjelaskan bahwa fenomena *echo chamber* memperkuat "tribalisme epistemik", yaitu kecenderungan suatu kelompok untuk menolak norma di luar komunitasnya. Dalam konteks Indonesia, Lim (2017) menunjukkan bagaimana polarisasi digital menajamkan nasionalisme kesukuan dan intoleransi ideologis. Identitas etnis, agama, maupun afiliasi politik kerap dijadikan jangkar evaluasi, siapa yang berbicara menjadi lebih menentukan daripada apa argumen yang diajukan. Akibatnya, rujukan normatif yang tadinya bersifat lintas-kelompok (misalnya, keadilan prosedural, penghormatan martabat, atau kepentingan umum) tereduksi menjadi rujukan intra-kelompok. Perbedaan pendapat mudah dilekati label moral sehingga dialog meluncur ke arah delegitimasi lawan, bukan pemeriksaan alasan.

Pada titik ini, fungsi diskursus publik bergeser. Alih-alih wadah deliberasi, ruang publik menjadi arena pertarungan identitas. Ukuran keberhasilan komunikasi tidak lagi "apakah alasan kita bisa diterima oleh pihak yang berbeda?" melainkan "apakah pesan kita mengukuhkan identitas kita dan memobilisasi barisan sendiri?". Pergeseran ini selaras dengan diagnosis Habermas tentang peralihan dari tindakan komunikatif menuju tindakan strategis. Bahasa dipakai bukan untuk saling memahami (*Verständigung*) melainkan untuk memengaruhi dan memenangkan (Habermas, 1987). Dengan mengacu pada Goldkuhl (2012), validitas komunikasi dalam konteks ini lebih banyak ditentukan oleh resonansi emosional ketimbang rasionalitas argumentatif. Diskursus publik kehilangan orientasi deliberatifnya dan berubah menjadi arena konfirmasi ideologis yang tertutup terhadap perbedaan pandangan (Habermas, 2023).

### 4. Klaim Ketulusan dan Krisis Kepercayaan

Klaim ketulusan dalam kerangka teori tindakan komunikatif Habermas merujuk pada transparansi penutur mengenai keyakinan subjektifnya, apakah ia sungguh meyakini proposisi yang disampaikan (Habermas, 1984). Dalam ruang digital, relasi antara tuturan dan penanggung jawab tuturan tersebut melemah karena anonimitas, pseudonimitas, serta keberadaan akun tiruan, bot, dan operasi troll, yang secara sistematis mengaburkan akuntabilitas dan memicu krisis kepercayaan terhadap informasi maupun sumbernya. Dalam kondisi demikian, rasionalitas komunikatif mudah tergantikan oleh komunikasi strategis yang berorientasi pada kalkulasi instrumental (jangkauan, efek emosional, atau keuntungan politis) alih-alih pencapaian saling pengertian, sehingga pergeseran dari tindakan komunikatif menuju tindakan strategis kian menonjol (Habermas, 1987; lihat pula Leiviskä, 2023).

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas



Sebagai respons normatif, Leiviskä (2023) mengajukan konsep kepercayaan epistemik (*epistemic trust*), yakni kepercayaan yang ditopang oleh keterbukaan terhadap alasan, bukti, dan penilaian ulang, bukan oleh atribusi persona semata. Kepercayaan ini dibangun melalui penyediaan alasan yang dapat diaudit secara intersubjektif, rujukan sumber primer, penjelasan metode, pengakuan ketidakpastian, serta kesiapan merevisi klaim ketika bukti menuntutnya. Dengan demikian, yang diminta dari audiens bukan penerimaan tak bersyarat atas pernyataan, melainkan penerimaan atas prosedur pembenaran yang transparan dan dapat diuji.

Kerangka tersebut selaras dengan literasi digital kritis (Mihailidis & Viotty, 2017), yang menempatkan warga digital sebagai penilai aktif atas kredibilitas sumber, motif komunikator, dan insentif struktural platform. Praktik literasi kritis tidak berhenti pada verifikasi faktual, melainkan mencakup penelusuran jejak bukti dan tautan primer, perbandingan lintas-sumber, pemeriksaan waktu dan konteks publikasi, evaluasi struktur justifikasi (*klaim–data–warrant*), identifikasi framing emosional, serta deklarasi konflik kepentingan. Indikator operasional dari kepercayaan epistemik pada aras interaksi tampak pada konsistensi alasan, keterbukaan terhadap kritik, dan *answerability* yakni kesediaan penutur hadir kembali untuk mempertanggungjawabkan klaimnya.

Untuk pengarusutamaan secara institusional, standar tersebut dapat dioperasionalkan berlapis: (i) pada level mikro, melalui praktik penulisan publik yang menyertakan data, rujukan, alasan, pernyataan ketidakpastian, dan komitmen koreksi; (ii) pada level meso, melalui desain platform yang memberi sinyal akuntabilitas (rekam jejak akurasi, konteks tambahan untuk unggahan, serta friksi deliberatif sebelum menyebarkan klaim berisiko tinggi); dan (iii) pada level makro, melalui standar transparansi dan mekanisme audit independen bagi klaim yang berpengaruh luas. Arsitektur berlapis ini mengembalikan orientasi percakapan pada pertukaran alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pada produksi sinyal popularitas.

Konsep kepercayaan epistemik melengkapi perluasan dimensi validitas komunikasi yang diusulkan Goldkuhl (ketepatan deskriptif, relevansi bagi audiens, penghormatan, dan kekuatan argumentasi) dengan jangkar prosedural bagi kebenaran klaim (Goldkuhl, 2012). Sintesis keduanya menyediakan matriks evaluatif yang simultan yaitu dengan standar pragmatis untuk kualitas interaksi serta standar epistemik untuk ketangguhan klaim. Dengan kerangka terpadu ini, ruang publik digital dapat diarahkan tetap inklusif secara normatif sekaligus bertanggung jawab secara kognitif (Habermas, 1984, 1987; Leiviskä, 2023; Mihailidis & Viotty, 2017).

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**

Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

## E. PENUTUP

Penguatan literasi digital kritis menjadi strategi penting untuk menjembatani ketegangan ini. Literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk menilai klaim informasi secara rasional, menguji kebenaran, dan menjaga deliberasi publik dari distorsi algoritmik maupun misinformasi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya mendorong pendidikan literasi digital kritis di berbagai level masyarakat, agar partisipasi dalam ruang digital tidak sekadar reproduksi hoaks, tetapi juga kontribusi terhadap penguatan ruang publik yang rasional.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan kembali relevansi filsafat komunikasi Habermas dalam membaca fenomena hoaks dan misinformasi di era digital. Kerangka ini tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan pijakan normatif bagi masyarakat untuk membangun ruang komunikasi yang lebih sehat, berorientasi pada kebenaran, dan mendukung terciptanya konsensus sosial yang kokoh di tengah derasnya arus informasi global.

## REFERENSI

- APJII. (2024). *Laporan survei internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1160>
- Collier, D. (1993). The comparative method. In A. W. Finifter (Ed.), *Political science: The state of the discipline II* (pp. xx–xx). Washington, DC: American Political Science Association.
- Goldkuhl, G. (2012). The validity of validity claims: An inquiry into communication rationality. *Systems, Signs & Actions*, 5(1), 7–23.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action: Vol. 2. Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.
- Habermas, J. (2023). *A new structural transformation of the public sphere and deliberative politics*. Cambridge, UK: Polity.

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
 Surya Adinata Putra**  
 Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
 Habermas

- Kominfo. (2024). *Laporan tahunan hoaks 2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Leiviskä, A. (2023). Truth, moral rightness, and justification: A Habermasian perspective on decolonizing the university. *Educational Theory*, 73(6), 649–667. <https://doi.org/10.1111/edth.12575>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Mihailidis, P., & Viotty, S. (2017). Spreadable spectacle in digital culture: Civic expression, fake news, and the role of media literacies in “post-fact” society. *American Behavioral Scientist*, 61(4), 441–454. <https://doi.org/10.1177/0002764217701217>
- Oxford Dictionaries. (2016, November 8). Word of the Year 2016: *Post-truth*. Retrieved from Oxford Languages.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin.
- Przeworski, A., & Teune, H. (1970). *The logic of comparative social inquiry*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Sartori, G. (1991). Comparing and miscomparing. *Journal of Theoretical Politics*, 3(3), 243–257. <https://doi.org/10.1177/0951692891003003001>
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- van Dyk, S. (2022). Post-truth, the future of democracy and the public sphere. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 37–50. <https://doi.org/10.1177/02632764221103514>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

**Anwar Ibrahim Triyoga, Irma Surayya Hanum, M. Rodinal Khair Khasri,  
Surya Adinata Putra**  
Bahasa dan Kebenaran dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim  
Habermas

Waisbord, S. (2018). Truth is what happens to news: On journalism, fake news, and post-truth. *Journalism Studies*, 19(13), 1866–1878.

<https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.